

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan

Maulidayani, Candra Wijaya, Asnil Aida Ritonga
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
maulidayani8461@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model Medan, 1) Bagaimana langkah-langkah implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan?, 2) Bagaimana karakteristik proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan?, 3) Bagaimana monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam memperkuat kesahihan data hasil temuan dan keotentikan penelitian, peneliti mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang disarankan oleh Lincoln & Guba (1985), yang terdiri dari *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Hasil penelitian ini menemukan: 1) Langkah-langkah implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan secara top down. Kebijakan pengembangan kurikulum ini menjadikan madrasah menerapkan dua jenis kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 dan SKS. Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum ini juga melibatkan guru, pegawai, WKM, dan Komite Madrasah, 2) Karakteristik proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan mengacu pada cetak biru atau blue print program kurikulum. Dokumen ini berisi panduan dan hal-hal terkait implementasi kurikulum di MAN 2 Model Medan. Secara keseluruhan, proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model Medan dianggap baik, tetapi masih perlu mengatasi kendala yang ada, yakni terkait implementasi muatan lokal; dan 3) Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir program. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu madrasah dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Pengembangan Kurikulum

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan kurikulum mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan sebuah bangsa. Indriyanto menegaskan bahwa “pengembangan kurikulum merupakan intervensi kebijakan mutu pendidikan, karena kurikulum merupakan bagian dari software bagi berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar yang efektif. (Indriyanto, 2012: 440). Sejalan dengan pendapat ini, Munandar (2017) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kurikulum akan sangat menentukan seperti apa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dilaksanakan. Kurikulum memberikan arah yang terencana dan jelas terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang benar akan nampak melalui implementasi kurikulum yang diterapkan karena “kurikulum merupakan jantung pendidikan” yang menentukan keberlangsungan pendidikan.

Kadi & Awwaliyah (2017:144-155) menegaskan bahwa melalui berbagai peraturan dan perundangan pemerintah telah menetapkan kebijakan baik bagi penyelenggaraan pendidikan maupun meningkatkan kompetensi lulusan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas proses dan lulusan pendidikan hanya dapat dilakukan melalui pengembangan dan inovasi kurikulum yaitu “pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan”.

Proses penyesuaian kurikulum dengan tuntutan perubahan dan perkembangan dinamika pendidikan lebih dikenal dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menurut Suparlan (2011:79) adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sukmadinata (2011:150) menambahkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan rencana, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.

Menurut Mesiono dkk (2019:57-65), pengembangan kurikulum di madrasah memerlukan kemampuan berkreaitivitas dalam berbagai pihak terkait

dengan madrasah sebagai lembaga pendidikan, sehingga pada akhirnya kurikulum dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi anak didik, lembaga pendidikan dan sosial budaya masyarakat di sekitar lembaga pendidikan berada, dan pada akhirnya dimungkinkan untuk memasukkan mata pelajaran muatan lokal sesuai kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hal ini, peran aktif berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum sangat menentukan terhadap efektivitas keberhasilan institusi lembaga pendidikan dan menjadikan lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya berbeda sebagai bagian dari ciri khas lembaga pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya. (Raharjo, 201);54).

Adapun berbagai pihak yang berkaitan dalam pengembangan kurikulum di madrasah yaitu: guru dan peserta didik, kepala madrasah, komite madrasah, dan pemerintah. Pengembangan kurikulum dalam menyukseskan tujuan pendidikan merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan berbagai faktor yang penting di antaranya faktor landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan keilmuan dalam rangka memastikan bahwa pengembangan kurikulum yang dilakukan harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. (Syafaruddin & Amiruddin MS, 2017:15).

Pengembangan kurikulum yang telah diuraikan di atas tidak akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya apabila pengembangan kurikulum tidak mendapatkan dukungan penuh oleh kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu kebijakan sangat menentukan bagaimana keberhasilan dalam pengembangan kurikulum. Apple (2018:63-66) menyampaikan keluhan berkaitan dengan kebijakan kurikulum, beliau mengatakan *Speaking honestly, I am deeply concerned that too much of the field of curriculum has lost its way. Too much of it is characterized by a condition of historical amnesia. It has too often forgotten the key questions about what and whose knowledge should be official. It has become lost in postmodern abstractions and deconstructive despair. It is hermetic in too many ways and has in the process lost its ability to speak clearly about some major problems facing schools, teachers, students and communities.*

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan merupakan madrasah yang ada di Kota Medan dengan berbagai keunggulan. *Pertama*, Sebagai Madrasah Percontohan yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia; *Kedua*,

Memiliki Akreditasi Unggul “A”; *Ketiga*, memiliki kecukupan dalam hal sarana dan prasarana; *Keempat*, Madrasah ini didukung dengan guru yang sudah amat baik di antaranya berlatar belakang strata dua dan hampir secara keseluruhan sudah bersertifikasi guru; *Kelima*, Madrasah yang mengembangkan program unggulan berupa *fullday School* dan *Tahfizul Qur’an* bekerjasama dengan Lembaga Huffazh Center Indonesia (HCI) dan Program *One Day One Juz*; *Keenam*, memiliki berbagai prestasi yang diperoleh dan dukungan *stakeholders*; dan *Ketujuh*, Tahun 2015 ditetapkan sebagai Madrasah Adiwiyata Provinsi Sumatera Utara. Terkait dalam kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model berdasarkan hasil wawancara awal diperoleh keterangan bahwa hanya melibatkan unsur internal madrasah saja yakni kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru dan komite dengan membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dimana minus melibatkan *Stakeholders* maupun alumni.

Jika ditelaah secara mendalam, stakeholder dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal*. Stakeholder internal adalah publik yang berada didalam ruang lingkup madrasah. Stakeholder eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap madrasah, dan berada diluar madrasah. (Rujiah & Sa’diyah, 2021: 632-652). Hubungan baik dengan *stakeholder* memegang peranan penting sehingga dalam kondisi krisis pun kegiatan pendidikan tetap berjalan baik. Sinergitas atau kerjasama stakeholder baik internal dan eksternal demi terjamin nya mutu pendidikan sangat berperan penting dalam kontribusi keberlangsungan pendidikan.

Kebijakan pengembangan kurikulum idealnya melibatkan juga alumni, pelibatan ini bermanfaat untuk menyediakan informasi tentang profil alumni dan informasi langsung dari alumni terkait dengan kesesuaian kurikulum dengan bidang pekerjaan yang mereka geluti. Informasi-informasi ini akan berguna dalam evaluasi kurikulum yang digunakan selama ini.

Hasil penelusuran awal diperoleh keterangan bahwa kebijakan pengembangan kurikulum di madrasah ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh tanggapan “Sebelum masa Covid-19, ada beberapa kebijakan dalam pengembangan kurikulum yang sudah dilaksanakan di MAN 2 Model Medan. Namun setelah Covid-19, proses pembelajaran hanya berfokus pada pelaksanaan kurikulum yang

sudah terstandar sesuai dengan Struktur Kurikulum dari Kementerian Agama untuk Tingkat Madrasah Aliyah saja. Semua kegiatan penguatan, penambahan, ataupun ekstrakurikuler ditiadakan. Saat ini kurikulum yang sudah fix dari pemerintah tidak dikembangkan lagi, hanya berupa strategi bagaimana agar muatan kurikulum bisa tersampaikan kepada peserta didik. Pada prinsipnya mata pelajaran yang harus dipelajari pada semua jurusan di MAN 2 Model Medan terbagi 2 (dua). **Pertama**, untuk mata pelajaran wajib untuk setiap jurusan, misalnya PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Olah Raga, dan lain-lain; dan **Kedua**, Peminatan, pendalaman minat / lintas minat, sebagaimana diketahui bahwa jam wajib mengajar bagi seorang guru minimal 24 jampel setiap minggu, karena itu jika ada guru yang kekurangan jam mengajar, maka untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan membuat kebijakan penambahan jam mengajar melalui program pendalaman minat atau lintas minat. Intinya kebijakan lintas minat ini menguntungkan bagi guru sertifikasi yang belum tercukupi jam wajib mengajarnya, sehingga terpenuhi minimal 24 jampel setiap minggu. Adapun keuntungan bagi siswa bahwa lintas minat tersebut merupakan sebuah penguatan dalam menguasai materi pelajaran. Dalam masa pandemi seperti ini program ini tetap berjalan hanya saja durasi waktunya berbeda. Jika sebelum pandemi durasi waktu 45 menit / jampel namun sekarang ini hanya sekitar 30 menit atau bahkan 25 menit saja. Terkait Silabus dan materi untuk lintas minat disusun oleh guru TIM Pengembang Kurikulum dan dilaksanakan secara terprogram dengan menambahkan jam pelajaran tersendiri sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Pengembangan kurikulum ini dilaksanakan guna mewujudkan kualitas baik proses dan lulusan.

Berangkat dari keunikan tersebut, menjadi menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui *best practice* dengan mengangkat judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan.

B. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Istilah pengembangan menunjukkan kepada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang “baru”, dimana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan pengertian

pengembangan ini berlaku juga bagi kurikulum pendidikan. Karena pengembangan kurikulum juga terkait penyesunan kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya pada suatu pendidikan disertai pada evaluasi dengan intensif. (Gunawan, 2012:117). Istilah lain yang sering digunakan terkait dengan pengembangan kurikulum adalah pembinaan kurikulum.

Pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasikan kurikulum. Istilah pembinaan kurikulum atau sinonim dengan *curriculum building* merupakan upaya atau kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum potensi (program kurikulum) dengan maksud memperoleh hasil yang semakin baik. bila kita sudah mempunyai kurikulum, maka usaha kita melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya, memperlengkapi alat-alat yang ada dari segi jumlah maupun mutunya, meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh kurikulum yang bersangkutan, memilih dan menggunakan metode secara tepat, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, itu semua termasuk dalam usaha pembinaan kurikulum. (Gunawan, 2012:129).

Pengembangan kurikulum menurut Suparlan (2011:79) adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan Sukmadinata (2011:150) menambahkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan rencana, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, pengembangan kurikulum merupakan suatu cara untuk merencanakan dan melaksanakan kurikulum pendidikan pada suatu satuan pendidikan, agar menghasilkan sebuah kurikulum yang dapat bekerja sama dan menyesuaikan diri, sehingga menghasilkan kurikulum yang ideal operasional (dapat dilaksanakan), yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan

pendidikan dan daerah masing-masing. Kurikulum yang seperti ini yang dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Meskipun makna istilah pembinaan kurikulum dan pengembangan kurikulum itu berbeda, keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Hasil dari kegiatan pembinaan kurikulum merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, dan hasil dari kegiatan pengembangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan harus didukung dengan kegiatan pembinaan.

b. Kebijakan Perubahan Kurikulum

Dalam menyikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum. Padahal jauh lebih penting adalah perubahan kultural (prilaku) guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum. Dalam sejarah penggunaan kurikulum di Indonesia setelah merdeka, ada sepuluh perubahan kurikulum yang pernah dipakai yaitu kurikulum pascakemerdekaan 1947, 1949, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan KBK yang disempurnakan menjadi kurikulum KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan hingga Kurikulum 2013. Pada setiap periode kurikulum yang pernah diberlakukan tersebut model konsep kurikulum yang digunakan, serta jumlah jenis mata pelajaran berikut kedalaman dan keluasannya tidak sama. Belakangan mengalami perubahan kembali menjadi Kurikulum 2013. (Rohman, 2009:159).

Menurut Soetopo dan Soemanto (1991:40-41), terdapat sejumlah faktor yang dipandang mendorong perubahan kurikulum yaitu bebasnya sejumlah faktor yang dipandang mendorong perubahan kurikulum yaitu bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan pertumbuhan yang sangat pesat dari penduduk dunia.

Pengaruh pembaharuan kurikulum banyak sekali penyebabnya, dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan dapat dengan mudah mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, yang pertama faktor penyebab perubahan kurikulum, bisa berubah dikarenakan sistem pemerintahan yang juga berubah misalnya adanya pergantian presiden yang baru, pasti ada juga pembaharuan-pembaharuan yang

dilakukan yang mana segala sisi dari sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan pendidikan sistemnya pun dapat berubah juga.

Selanjutnya adalah adanya perubahan kemajuan informasi, teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju, dengan adanya pembaharuan teknologi yang semakin cepat diharapkan kurikulum disini dapat mengikuti adanya kemajuan itu, demi menghindari adanya keterlambatan informasi yang diperoleh yang mana dengan adanya pembaharuan teknologi dan majunya zaman maka kurikulum yang baru juga dapat menjadikan dan melahirkan kader yang memiliki keahlian yang menunjang dan juga bisa menghadapi realita kenyataan di dunia kerja nantinya.

Penyebab selanjutnya yaitu adanya gagasan baru dari para ahli pendidikan yang mana perlu adanya pembaharuan terhadap kurikulum, yang mana mungkin memiliki suatu gagasan yang sudah lama dipikirkan dan dirancang, dan mengetahui tentang adanya gaya belajar baru yang lebih baik dan yang pasti sangat efisien bila ditetapkan di era sekarang misalnya pada kurikulum 2013 ini gagasan yang baru mengenai pembelajaran aktif penekanannya kepada siswa disini siswa dapat lebih menyalurkan pendapat mereka dan dapat dilakukan secara berdiskusi dan saling bertukar gagasan atau pengalaman. Selanjutnya adanya proses pembaharuan pada masyarakat yang mana masyarakat disini mengalami perubahan mulai dari sifat, perilaku, kebiasaan, dan trend dengan cepat dan bisa mengarah ke hal baik maupun kurang baik yang mana hal tersebut sangat mempengaruhi keadaan sosial dalam masyarakat dan dapat juga mempengaruhi dalam dunia pendidikan sehingga kurikulum harus bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial dalam masyarakat ini sangat berguna dan membantu proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang mana misalnya dalam alat transportasi untuk berangkat ke sekolah sekarang sangat mudah dengan adanya taxi atau ojek online seperti GO-JEK, GRAB, MAXIM dan sebagainya, ini pembaharuan atau kebiasaan yang baru dalam masyarakat yang menuju kearah yang baik, sedangkan pembaharuan yang kurang baik contohnya adalah penyalahgunaan aplikasi-aplikasi HP android yang dapat mengambil data pribadi pemilik atau pengguna HP tersebut dan digunakan sebagai bentuk kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Keahlian di era mendatang wajib untuk menguasai keahlian komunikasi, ideologis, karakter, dan dapat menyelesaikan suatu kesulitan dalam kekurangan kurikulum yang mungkin terjadi dengan sikap yang baik, kooperatif, dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang mana perubahan kurikulum disini terdapat beberapa hal sehingga terjadinya pembaharuan pada kurikulum dapat berhubungan Antara hal satu dan hal lain, sehingga perkembangan pembaharuan kurikulum ini dapat menuju ke arah yang baik dan optimal serta meminimalisir kesalahan atau kekurangan pelaksanaan kurikulum sebelumnya, dan kurikulum disini harus berubah, maksudnya berubah yaitu selalu mampu dan bisa untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, yang ada. Sehingga proses pembaharuan kurikulum disini harus dirancang sebaik mungkin dan juga harus melalui seleksi yang matang, dan pelaksanaan dilapangan harus diawasi dan diberikan masukan, sehingga dapat menjadikan mutu pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi dan dapat terciptanya tujuan pendidikan nasional.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dimana subyek penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Tim Pengembang Kurikulum, Guru, Komite Madrasah, dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Dalam memperkuat kesahihan data hasil temuan dan keotentikan penelitian, peneliti mengacu kepada penggunaan standar keabsahan data yang disarankan oleh Lincoln & Guba (1985), yang terdiri dari *creadibility*, *tranferability*, *dependability* dan *comfirmability*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

MAN 2 Model Medan telah menerapkan kebijakan pengembangan kurikulum dengan dua jenis kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 dan SKS. Mereka juga menjadi satu-satunya madrasah yang menerapkan IKM pada siswa kelas X.

Pengembangan kurikulum ini menjawab perkembangan pendidikan dan dijalankan secara *top-down*, langkah ini diambil agar dalam pengimplementasian kurikulum yang sudah ditetapkan benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya baik dari segi muatan maupun teknis pelaksanaannya disamping hal ini menunjukkan alur kebijakan dari penetapan kebijakan pengembangannya yang diambil atau ditetapkan dan kebijakan ini juga merupakan bagian dari kebijakan strategis dari madrasah. Senada dengan hal ini, Amiruddin (2017) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang berhasil adalah implementasi kebijakan yang melalui pelaksanaan langkah-langkah yang baik, tepat dan strategis. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan menjelaskan alur bagaimana sebuah keputusan ditetapkan oleh pengambil keputusan (Amiruddin, 2017). Langkah-langkah kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam mensukseskan tujuan kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam formulasi pendidikan yang disusun secara terukur dengan langkah-langkah yang tepat diharapkan kebijakan pendidikan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, namun dalam implementasi pengembangan kurikulum ini masih dihadapkan pada kendala berupa kesiapan stakeholder, keterbatasan dana, dan pelatihan yang kurang. MAN 2 Model Medan melibatkan guru, pegawai, WKM, dan Komite Madrasah dalam implementasi kurikulum. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui pembahasan masalah dan pelatihan mandiri. Setiap tahun, MAN 2 Model Medan melaksanakan kebijakan pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum berbasis SKS dan IKM.

Karakteristik proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan mengacu pada cetak biru atau blue print program kurikulum, dimana dokumen ini berisi panduan dan hal-hal terkait implementasi kurikulum di MAN 2 Model Medan. Sejalan dengan hal ini, Rusdiana (2015:38) menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki karakteristik. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik antara lain: a) memiliki tujuan pendidikan, b) memiliki aspek legal-formal yang bisa dipertanggungjawabkan, dan c) memiliki konsep operasional yang jelas. Karakteristik ke bijakan adalah hal yang penting dalam kebijakan dan terkait dengan organisasi kebijakan. Organisasi saling memiliki hubungan yang sistematis

antara orang-orang yang bekerjasama dan berbagai komponen organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Meskipun demikian, Secara keseluruhan, proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model Medan dianggap baik, tetapi masih perlu mengatasi kendala yang ada, yakni terkait implementasi muatan lokal.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model Medan, Monev (monitoring dan evaluasi) dilaksanakan sebagai bagian penting dalam memastikan keberhasilan program. Monev dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir program. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu madrasah dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam monev antara lain instrumen yang belum memenuhi standar dan kurangnya kesiapan petugas monev. Evaluasi dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh stakeholder madrasah, termasuk kepala madrasah, kepala tata usaha, para WKM, dan tim pengembang madrasah. Evaluasi bertahap ini membantu dalam mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.

Tilaar & Nugroho (2012:226) menegaskan bahwa pelaksanaan monev terkait implementasi kebijakan pengembangan kurikulum dilaksanakan berbagai tahapan diantaranya: pada saat perencanaan dilaksanakan, pada waktu pelaksanaan kegiatan, pada akhir tahun program kegiatan.” “Monev sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah program yang di rencanakan telah sesuai dengan kondisi pelaksanaan dilapangan. Selesai itu monev juga diperlukan sebagai bentuk pengukuran (*measurement*) terhadap sebuah program. Evaluasi diperlukan untuk melihat antara “harapan” dengan “kenyataan”.

E. KESIMPULAN

1. Langkah-langkah implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan secara top down. Kebijakan pengembangan kurikulum ini menjadikan madrasah menerapkan dua jenis kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 dan SKS. Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum ini juga melibatkan guru, pegawai, WKM, dan Komite Madrasah.
2. Karakteristik proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan mengacu pada cetak biru atau blue print program kurikulum. Dokumen ini berisi panduan dan hal-hal terkait implementasi kurikulum di MAN 2 Model Medan. Secara keseluruhan, proses implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di MAN 2 Model Medan dianggap baik, tetapi masih perlu mengatasi kendala yang ada, yakni terkait implementasi muatan lokal.
3. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir program. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu madrasah dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

REFERENCES

- Heri Gunawan. 2012. *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Huberman, A.M. & Miles, M.B. 1994. "Data Management and Analysis Methods". In Denzin N.K. and Lincoln Y.S. (eds). (1994). *Handbook of Qualitative Research*, New Delhi: Sage Publications.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadi dan Awwaliyah. 2017. *Inovasi Pendidikan: Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Islam Nusantara, 1 (2).
- Lincol, Y.S and Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication.
- Mesiono, Aziz, Syafaruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul'Aly Medan*. Jurnal Ta'dib. 22 (2).
- Michael W. Apple. *Critical Curriculum Studies and The Concrete Problems of Curriculum Policy and Practice*. Journal Of Curriculum Studies, Ordic Journal of Studies In Educational Policy, Vol. 4, No. 2, 2018, 63–66.
- Muhammad Rohman 2011. *Kurikulum Berkarakter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oemar Hamalik. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas nomor 13 Tahun 2007. Tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.
- Riant Nugroho. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suparlan, 2011. *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafaruddin dan Amiruddin MS 2017. *Manajemen Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing.

